

**Analisis Framing Pemberitaan Pemindahan Ibukota Negara (IKN) Indonesia
Di Media Online Republika.co.id dan Tempo.co**

Edison Bonartua Hutapea
Dosen Parcasarjana Ilmu Komunikasi
Universitas Paramadina
Email: bond9167@gmail.com

Lasria Sinambela
Program Studi Magister Pasca-Sarjana Komunikasi Politik
Univesitas Paramadina

Abstract

Media has an important role on giving information relating to the government policy in moving the national capital of Indonesia to East Kalimantan and inaugurating the zero point of this national capital. The news conveyed by the media about the relocation of national capital actually functions as information and education. After the news of relocating the national capital has spreaded, the online media started to review this information. How does media study this information? To answer this question, researcher has conducted study to examine the news by framing the news about moving the national capital of Indonesia to East Kalimantan and inaugurating the zero point of this national capital from media online Republika.co.id and Tempo.co. The purpose of this research is to find out the difference in framing the social reality construction, commodification of content and ideology of the Republika.co.id and Tempo.co. This study uses a qualitative method with Pan and Kosick model framing analysis. The result of this study based on syntatic, script, thematic, and rhetorical devices find that there are differences in media framing by Republika.co.id and Tempo.co in constructing news. Republika.co.id focuses on highlighting and supporting the government's policy of transferring the IKN, while Tempo.co emphasize criticism for government.

Keywords: *Framing, Moving the National Capital of Indonesia, Zero Point Inauguraton, Online Media, Qualitative*

Pendahuluan

Wacana pemindahan ibu kota negara yang awalnya berlokasi di DKI Jakarta dan berpindah lokasi ke Kalimantan Timur, terjadi karena terlalu banyaknya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pemerintah. Pemaparan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di acara *Youth Talks* pada tanggal 20 Agustus 2019, disampaikan sejumlah permasalahan tersebut meliputi penduduk di Pulau Jawa yang terlalu padat sehingga penyebaran penduduk yang tidak merata di pulau lain, seperti: Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah mendominasi sehingga pulau lainnya pertumbuhan ekonominya tertinggal. Masalah lainnya adalah krisisny ketersediaan air yang layak untuk konsumsi masyarakat, kemudian proporsi konsumsi lahan yang sudah dibangun di Pulau Jawa mendominasi bahkan lima kali lipat dari Pulau Kalimantan. Masalah yang begitu kompleks dan sulit diatasi tersebut disebabkan karena perkembangan DKI Jakarta yang tidak seimbang lagi dengan manajemen kota yang kurang baik, dan beban pemerintahan sekaligus pusat bisnis sudah dirasa sangat membebani Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta.

Informasi yang bersumber dari *Tempo.co* (26/08/2019) menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo memilih lokasi ibu kota negara yang baru karena mempunyai beberapa kelebihan, yaitu: risiko akan bencana alam yang dinilai sangat minim, lokasinya yang strategis ditengah – tengah wilayah Republik Indonesia, infrastruktur yang relatif lengkap dan telah tersedia, lahan yang cukup luas yaitu: 158 ribu hektar. Selain itu tujuan pemindahan ibu kota negara juga untuk meratakan penyebaran penduduk karena dari tahun ketahun terjadi lonjakan penduduk yang terus menerus memenuhi Pulau Jawa dan DKI Jakarta, salah satunya untuk mencari pekerjaan guna menyambung kehidupan.

Semenjak gagasan ini dicetuskan, banyak pro dan kontra yang muncul dari kalangan masyarakat hingga para pejabat negara. Perdebatan mulai terjadi mengenai seberapa besar total anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat, hingga wajah DKI Jakarta kedepannya. Perdebatan-perdebatan dan statement-statement yang bermunculan tentunya tak luput dari liputan berbagai media. Bahkan berita mengenai dampak yang terjadi dari pemindahan lokasi ibu kota negara ini masih beredar luas hingga Februari 2022 di laman

website: Republika.co.id dan Tempo.co. Langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo ini tentu cukup menyita perhatian sebagian besar Rakyat Indonesia yang kemudian membuat media-media cetak maupun *online* menjadi berlomba-lomba untuk melaporkan kabar terkini, terkait dengan pemindahan lokasi Ibu Kota Negara Indonesia.

Pemindahan lokasi ibu kota negara bukan hanya sebatas simbol identitas negara saja, akan tetapi juga sebagai representasi kemajuan bangsa dan negara itu sendiri. Sehingga, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota negara bertujuan untuk pemerataan dan keadilan ekonomi Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Ibu kota negara baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep *modern, smart, and green city*, menggunakan energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil.

Presiden Joko Widodo meyakini bahwa proses pemindahan ibu kota negara tidak akan memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang besar, maka dari itu diperlukan partisipasi dari pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menilai, ibu kota negara yang baru harus terbebas dari berbagai bencana alam dan membutuhkan lahan luas wilayah yang akan dibangun sekitar 199 ribu hektare sebagai wilayah pengembangan dan sekitar 56 ribu hektare sebagai kawasan ibu kota negaranya sendiri, serta 6.700-an menjadi kawasan inti. "Total ada 256 ribu hektare dan dengan luas yang luar biasa itu, 20 persen yang akan jadi *built up area* dan 80 persen dibiarkan menjadi hutan. Sehingga, Ibu Kota Negara (IKN) akan menjadi wilayah *forest city* atau kota hutan," imbuhnya.

Klaim atas penundaan Pemilu adalah kemauan masyarakat langsung dibantah Drone Emprit dan lembaga survei lainnya, yang menyatakan mayoritas masyarakat menolak penundaan Pemilu adalah kredibilitas terpuruk! Namun, lobby-lobby kepada Ketum Parpol mungkin masih akan terus berjalan. Bahkan dapat makin bertambah intens. Semua kekuatan dikerahkan secara *all-out* sampai berhasil. Untuk itu, masyarakat harus waspada. Tidak boleh lengah sampai Tahun 2024. Terkait ibu kota negara yang bermasalah, meliputi pembahasan dan pengesahan UU yang super cepat, terkesan ada yang ditutup-tutupi/sembunyi-sembunyi, seakan melanggar konstitusi sehingga menuai gugatan dari masyarakat. Konsep otorita melanggar kedaulatan daerah, merebut tanah milik daerah menjadi milik otorita, milik

pemerintah pusat: aneksasi.

Tidak ada satu orang yang cukup normal bisa mengerti pemindahan ibu kota negara yang penuh metamistik ini. *Softbank* juga tidak mengerti, tidak tertarik terlibat di Nusantara, dimungkinkan juga marah dijadikan bahan marketing dan pencitraan terus-menerus akhirnya terbongkar juga. Pemindahan ibu kota negara ternyata masalah proyek. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan ada bagi-bagi kapling. Kemudian, petinggi konglomerat ditunjuk sebagai nakhoda Nusantara. Dia berasal dari Group Sinar Mas. Konglomerat yang sangat dekat dengan kekuasaan. Isunya bahkan sudah “menguasai” penguasa, apa hal itu benar? Makanya, kasus kebakaran hutan selesai dengan “damai”? Dan investasi ke beberapa perusahaan *startups* anak presiden Joko Widodo juga sangat lancar?

Sikap kritis *Tempo.co* terhadap pemberitaan kebijakan pemerintah terkait pemindahan IKN juga dibuktikan dalam data yang dikumpulkan Lembaga survei Lingkaran Suara Publik (LSP). LSP menggelar survei terkait tingkat ketersetujuan masyarakat soal pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Melalui survei yang dilakukan pada tanggal 7-20 Februari 2022, hasilnya menunjukkan bahwa 27 persen lebih publik setuju soal pemindahan Ibu Kota Negara. Sebanyak 9,5 persen publik sangat setuju dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Sedangkan sebanyak 21,4 persen menyatakan netral.

Kemudian sebanyak 23,8 persen publik tidak setuju atas perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Sebanyak 10,5 persen juga menyatakan sangat tidak setuju atas perpindahan tersebut. Sebanyak 7,1 persen responden menyatakan tidak menjawab/tidak tahu. Survei dilakukan terhadap 1.230 sample responden yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Survei diambil melalui sesi wawancara langsung dengan bantuan kuisisioner. Ada pun *margin of error* hasil survei ini adalah 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 95 persen.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana *framing* media terkait pemberitaan pemindahan IKN Baru. Penelitian ini diberi judul “Analisis Framing Pemberitaan Pemindahan Ibukota Negara (IKN) di Media Online *Republika.co.id* dan *Tempo.co*”.

Peneliti akan melakukan metode analisis *framing* di *Republika.co.id* dan *Tempo.co*. kedua media tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena selain sikap media yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah terkait pemindahan IKN Baru seperti yang dipaparkan

sebelumnya, *Republika.co.id* dan *Tempo.co* juga media *online* yang dikenal jujur dan independen. Keduanya juga termasuk media *online* di Indonesia yang telah terdaftar di dewan pers dan sering diakses khlayak.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana *framing* pemberitaan kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara di media *online* *Republika.co.id* dan *Tempo.co*?

Metodelogi Penelitian

Penelitian yang baik merupakan penelitian yang mengikuti panduan, aturan, serta langkah-langkah yang digunakan agar mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum, aturan dan langkah tersebut dikenal sebagai metodologi penelitian. Menurut pandangan Krisyantono (2006), terdapat dua metodologi yang digunakan, yaitu: kualitatif dan kuantitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui sebuah objek penelitian secara lebih mendalam sekaligus mengetahui aspek-aspek yang ingin diketahui dalam penelitian secara lebih seksama. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Danial dan Nanang (2009) yang menyatakan bahwa metode ini dari aspek *phenomenologis* menuntut pendekatan secara menyeluruh atau mendudukan sebuah kajian dalam konstruksi ganda serta melihat sebuah objek dari sisi alaminya.

Teori Framing

Framing merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita itu (Eriyanto, 2020). Sementara Todd Gitlin, (dalam Eriyanto, 2020) mendefinisikan *framing* adalah sebuah strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada

khalayak pembaca.

Peristiwa-peristiwa tersebut ditampilkan dalam pemberitaan agar terlihat menonjol dan dapat menarik perhatian khalayak pembaca. *Frame* merupakan prinsip dari seleksi, penekanan, dan peresentasi dari realitas. Menurut Gitlin, (Eriyanto, 2020) *Frame* adalah bagian yang pasti hadir dalam praktik jurnalistik.

“Lewat *frame*, jurnalis mengemas peristiwa yang kompleks tersebut menjadi peristiwa yang dapat dipahami, dengan perspektif tertentu dan lebih menarik perhatian khalayak. Laporan berita dari wartawan pada akhirnya ditulis oleh wartawan yang akhirnya menampilkan apa yang dianggap penting, apa yang perlu ditonjolkan, dan apa yang perlu disampaikan oleh wartawan kepada khalayak (Eriyanto, 2002).”

Berbagai definisi *framing* di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah realitas bisa jadi dibingkai dan dimaknai secara berbeda oleh media. Akhirnya, pemaknaan setiap peristiwa atau isu tertentu bisa jadi akan sangat berbeda. Seperti yang disampaikan Eriyanto (2002), Perbedaan tersebut muncul karena realitas pada dasarnya bukan ditangkap dan ditulis, realitas sebaliknya dikonstruksi. Proses konstruksi tersebut ada banyak penafsiran dan pemaknaan yang berbeda-beda dalam memahami realitas. Efek yang ditimbulkan pada pembacanya pun akan berbeda-beda.

Pembahasan

Media massa memiliki peran dalam menyebarkan informasi terkait rencana pemindahan ibu kota negara dan peresmian titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara menjadi penting. Pemberitaan yang disampaikan melalui media massa akan menentukan sikap masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan pemindahan ibu kota negara dan peresmian titik nol IKN. Media massa dianggap sebagai lembaga yang netral. Media massa akan selalu berada dalam tarik ulur antara berbagai kepentingan yang semuanya bersumber dari kepentingan politik dan ekonomi.

Dalam masyarakat kapitalis, media massa memiliki posisi strategis, penting dan menciptakan hegemoni karena media massa telah memperoleh kebebasan penuh. Terkait pemindahan ibu kota negara dan peresmian titik nol IKN, semestinya media massa harus menjadi badan independen yang melaporkan kebijakan pemerintah dan berfungsi sebagai

“anjing penjaga” bagi masyarakat (Hadi, Wahjudianata, & Indrayani, 2020).

Kajian penelitian ini berfokus pada tiga kategori, yaitu kronologi, kebijakan dan tanggapan pihak eksternal. Ketiga kebijakan ini dipilih penulis karena penulis berusaha mendapatkan bagian terbesar di media massa. Berita ini dijadikan sampel penelitian berfokus pada tanggal 16 – 19 Agustus 2019, awal perencanaan pemindahan ibu kota negara. Pada periode tanggal 10 – 18 Maret 2022 adalah peresmian titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara. Periode tersebut berita terkait kronologi, kebijakan dan tanggapan pihak eksternal sedang hangat dan terus diliput atau diberitakan Republika.co.id dan Tempo.co.

Di media massa, framing menjadi aspek atau alat kognitif yang digunakan untuk menyajikan fakta-fakta atau informasi kepada masyarakat luas, mulai dari mengidentifikasi kode, menjelaskan, hingga cara menyajikannya. Setiap media memiliki konsep dalam membingkai berita untuk menentukan berita yang mana yang akan ditonjolkan agar pembaca lebih memperhatikan informasi yang dibingkai (Eriyanto, 2002).

Berdasarkan hasil analisis, terdapat perbedaan *framing* Republika.co.id dan Tempo.co. Hasil analisis komparatif dari ketiga kerangka kebijakan tersebut dapat dilihat secara singkat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1 *Frame* **Republika.co.id** terkait rencana pemindahan ibu kota negara dan peresmian titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara

Struktur	Republika.co.id			
	Kebijakan pemindahan IKN: Berita 1	Kebijakan Peresmian Titik Nol IKN: Berita 2	Tanggapan: Eksternal 1	Tanggapan: Eksternal 2
Sintaksis	Republika.co.id memaparkan bahwa pemerintah memindahkan ibu kota negara.	Republika.co.id menjelaskan peresmian titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara dan mengadakan	Berdasarkan pemberitaan artikel diatas Republika.co.id bermaksud memberi	Berdasarkan pemberitaan di atas Republika.co.id ingin memaparkan

	<p>Berita ini diawali dengan judul, lead dan penutup. Lead menjelaskan bahwa Presiden Jokowi meminta ijin kepada anggota DPD dan DPR untuk memindahkan ibu kota negara ke pulau kalimantan. Ini demi visi Indonesia maju. Dalam berita yang lebih ditonjolkan adalah kutipan dan pernyataan.</p>	<p>prosesi ritual untuk menyatukan tanah dan air dari 34 provinsi seluruh Indonesia yang melambangkan kebhinekaan Indonesia sekaligus melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita ibu kota negara (IKN) Nusantara. Dalam berita yang lebih dominan adalah kutipan langsung dari narasumber dan pernyataan.</p>	<p>pandangan terkait perencanaan pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari headline berita yang digunakan “Oesman Sapta Odang ketua DPD dukung pemindahan ibu kota negra ke pulau Kalimantan”. Wartawan menggiring publik atau pembaca bahwasanya banyak yang mendukung kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara.</p>	<p>terkait peresmian titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara. Judul atau <i>headline</i> yang disajikan bernada positif dan netral. Lead meringkas apa yang menjadi isi pemberitaan. Isi pemberitaan merupakan informasi.</p>
--	--	---	---	---

<p>Skrip</p>	<p>Berita ini ditulis dengan menggunakan struktur piramida terbalik (<i>inverted pyramid</i>) unsur 5w+1h ditulis dengan lengkap. Unsur yang paling menonjol adalah <i>what</i>, <i>who</i> dan <i>why</i> untuk menguatkan pemerintah dalam perencanaan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke pulau Kalimantan.</p>	<p>Narasi yang disajikan atau ditulis lengkap dalam unsur 5W+1H. Aspek yang paling menonjol <i>who</i> dan <i>what</i> dalam berita. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendominasi narasumber yang dihadirkan oleh Republika.co.id, tidak diimbangi dengan menampilkan dua sisi dalam pemberitaan atau sering disebut dengan <i>cover both side</i>.</p>	<p>Unsur yang tidak terdapat dalam berita yaitu how. Unsur <i>what</i> menjelaskan apa yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu pemindahan ibu kota negara. Unsur <i>who</i> menjelaskan siapa yang mendukung kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara (IKN). Berikutnya unsur <i>when</i> merupakan waktu wawancara Minggu, 18 Agustus 2019, unsur <i>where</i> merupakan</p>	<p>Unsur <i>what</i> yang paling menonjol dijelaskan dalam kutipan dan pernyataan. Unsur <i>who</i> menjelaskan siapa saja yang turut menghadiri peresmian titik nol IKN dan melakukan prosesi ritual kendi Nusantara di IKN. Unsur <i>when</i> menjelaskan kapan diadakannya peresmian titik nol IKN, selanjutnya unsur <i>where</i> menekankan dimana diadakan peresmian IKN. Unsur <i>why</i> memaparkan mengapa</p>
--------------	--	--	--	---

			<p>lokasi wawancara dan lokasi ibu kota negara baru. Unsur <i>why</i> menjelaskan mengapa ibu kota negara di pindahkan. Unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur <i>who</i> dan <i>why</i>.</p>	<p>menggunakan prosesi ritual kendi Nusantara. Sementara unsur <i>how</i> menonjolkan bagaimana rangkaian acara dalam peresmian titik nol IKN dan prosesi kendi Nusantara yang mengumpulkan tanah dan air dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.</p>
Tematik	<p>Terdapat dua tema besar dalam berita ini, yang paling menonjol yaitu, (1) Jokowi minta izin ke parlemen DPD & DPR untuk memindahkan ibu kota negara ke pulau</p>	<p>Dalam berita terdapat tiga tema besar yang ditonjolkan adalah, (1) Pelantikan Kepala (Bambang Susantono) dan Wakil Kepala (Dhony Raharjoe) Otorita IKN. (2) Melaksanakan prosesi ritual</p>	<p>Berita artikel ini memiliki dua tema. Tema pertama adalah rencana pemindahan ibu kota negara ke pulau Klimantan. Tema kedua terkait potensi kebakaran hutan</p>	<p>Berita ini dikonstruksi setidaknya dua tema. Tema atau topik yang pertama yaitu peresmian titik nol IKN dengan adanya prosesi ritual kendi Nusantara yang menyatukan</p>

	<p>Kalimantan (2) Pemerintah mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan yaitu ketua DPD Oesman Sapta Odang, Perkumpulan Profesor Lingkungan Dukung Pemindehan Ibu Kota, dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto</p>	<p>penyatuan air dan tanah Nusantara dari 34 provinsi di Indonesia di lokasi titik nol IKN. (3) Ibu kota negara (IKN) akan dibangun dengan konsep <i>green</i> dan <i>forest city</i>.</p>	<p>dan wilayah Kalimantan</p>	<p>tanah dan air seluruh Indonesia. Yang kedua pembangunan IKN Nusantara yang berkonsep kota hutan, kendaraan ramah lingkungan.</p>
Retoris	<p>Ungkapan tertulis yang mengandung aspek leksikon yang paling di highlight dalam berita ini misalnya kata “demi visi Indonesia maju” dan “Indonesia</p>	<p>Terdapat unsur grafis atau foto dan leksikon pada kata “cita-cita besar”, “pekerjaan besar”, dan “tonggak sejarah”.</p>	<p>Berita ini menojolkan unsur grafis atau foto, diman foto yang disajikan Republika.co.id tidak berupa foto ilustrasi. Unsur leksikon terdapat pada kata “terserah Presiden”, “efek</p>	

	hidup selamanya” yang memiliki arti atau konotasi yang positif sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam perencanaan pemindahan ibu kota negara IKN. Terdapat unsur grafis atau foto yang menggabrkan isi dalam berita		domino”, “tertangani” dan “Indonesia hidup selamanya”	
<i>Frame</i>	Presiden Jokowi ijin ke parlemen untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) kepada parlemen, dan kebijakan ini disambut baik atau mendapat dukungan dari beberapa beberapa insitusi ataupun	Peresmian titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara, Melaksanakan prosesi ritual penyatuan air dan tanah Nusantara dari 34 provinsi di Indonesia di lokasi titik nol IKN. Serta IKN akan dibangun dengan konsep <i>green</i> dan <i>forest</i>	Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) presiden Jokowi minta ijin ke parlemen dan rencana pemindahan IKN ini mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti ketua	Peresmian titik nol IKN Nusantara melakukan prosesi ritual kendi Nusantara yang menyatukan tanah dan air dari seluruh Indonesia dan membangun IKN dengan

	kalangan.	city.	DPD Oesman dan dari perkumpulan profesor se-Indonesia	kosep kota hutan dan kendaraan ramah lingkungan.
--	-----------	-------	---	--

Tabel 4. 2 *Frame Tempo.co* terkait rencana pemindahan ibu kota negara dan peresmian titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara

Struktur	Tempo.co			
	Kebijakan pemindahan IKN: Berita 1	Kebijakan Peresmian Titik Nol IKN: Berita 2	Tanggapan: Eksternal 1	Tanggapan: Eksternal 1
Sintaksis	Berdasarkan analisis sintaksis, Tempo.co memaparkan terkait perencanaan pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan. Dalam pemberitaan terdapat headline, lead, dan penutup. Kutipan yang	Tempo.co menjelaskan pelaksanaan peresmian titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara dan mengadakan prosesi ritual kendi Nusantara untuk menyatukan tanah dan air dari seluruh provinsi yang ada Indonesia. Prosesi ritual tersebut melambangkan kebhinekaan Indonesia	Tempo.co menyampaikan terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) ke pulau Kalimantan. Presiden Jokowi meminta izin ke parlemen untuk pindahkan ibu kota negara. Kebijakan pemerintah tersebut mendapat	Analisis sintaksi dalam berita, Tempo.co menginformasikan pelantikan kepala dan wakil kepala Otorita IKN serta pelaksanaan peresmian titik nol IKN dan adanya prosesi ritual kendi Nusantara menyatukan tanah dan air dari seluruh Indonesia. Kutipan dan pernyataan

	<p>paling ditonjolkan adalah kajian yang komprehensif terkait pemindahan IKN. Kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota negara (IKN) mendapat respon kontra.</p>	<p>sekaligus melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita ibu kota negara (IKN) Nusantara. Dalam berita yang lebih dominan adalah kutipan langsung dari narasumber dan pernyataan.</p>	<p>tanggapan kontra dari Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR, mendapat kritikan terkait pemindahan IKN dari Sigit Sosiantomo sebagai wakil ketua komisi V DPR RI dan Prof Emil Salim guru besar Fakultas Ekonomi UI. Dalam pemberitaan terdapat headline, lead, dan penutup. Selanjutnya yang paling ditonjolkan adalah kutipan dan pernyataan.</p>	<p>mendominasi pemberitaan tersebut dan dilengkapi dengan headline, lead dan penutup. Peresmian titik nol IKN tentunya mendapat tanggapan pro dan kontra.</p>
--	--	--	--	---

<p>Skrip</p>	<p>Unsur <i>what</i> paling dominan dalam pemberitaan tersebut disampaikan dalam kutipan dan pernyataan. Unsur <i>who</i> menjelaskan beberapa narasumber dalam berita seperti Presiden Jokowi, wakil ketua DPR Fahri Hamzah, wakil ketua komisi V DPR Sigit Sosiantomo dan guru besar fakultas ekonomi UI Prof. Emil Salim. Unsur <i>why</i> menjelaskan mengapa ibu kota negara di pindah. Unsur <i>how</i> bagaimana proses pemindahan</p>	<p>Dalam berita ini unsur <i>what</i> menjadi yang lebih dominan yaitu peresmian titik nol (IKN) Nusantara dan prosesi ritual kendi Nusantara. Unsur <i>who</i> merupakan narasumber dalam berita. Unsur <i>where</i> adalah tempat dilaksanakannya peresmian titik nol (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan Jakarta. Unsur <i>when</i> adalah waktu pelaksanaan peresmian IKN 14 Maret 2022. Selanjutnya unsur <i>why</i> yaitu mengapa melaksanakan ritual kendi saat peresmian titik nol, unsur <i>how</i> bagaimana proses</p>	<p>Unsur skrip dalam pemberitaan ini dilengkapi dengan 5W+1H. Who, why dan what merupakan unsur yang paling ditonjolkan yaitu narasumber yang memberikan tanggapan terhadap peresmian titik nol dan prosesi ritual kendi Nusantara. Unsur <i>what</i> menjelaskan apa tanggapan dari narasumber dalam berita. Berita diimbangi dengan menampilkan dua sisi dalam</p>	<p>Narasi berita artikel tersebut disajikan atau ditulis lengkap dalam unsur 5W+1H. Aspek yang paling menonjol <i>who</i> dan <i>what</i> dalam berita. Narasumber yang dihadirkan oleh Republika.co.id, diimbangi dengan menampilkan dua sisi dalam pemberitaan, yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) narasumber yang mendominasi dalam berita namun diimbangi dengan narasumber yang lain seperti Nasrullah Antropolog Universitas Lambung Mangkurat (ULM),</p>
--------------	---	--	--	--

	IKN, berikutnya unsur <i>where</i> dan <i>when</i> merupakan tempat melakukan wawancara dan waktu.	peresmian IKN dan prosesi ritual IKN.	pemberitaan.	Kalimantan Selatan.
Tematik	Pemberitaan yang menyorot sosok pemerintahan Presiden Jokowi, secara tidak langsung jelas terlihat pada tema pertama. Yang kemudian ditegaskan dari kutipan langsung narasumber terkait perencanaan pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan. Presiden Jokowi meminta izin ke parlemen pindahkan IKN.	Tema dalam pemberitaan ini memiliki dua tema yang pertama peresmian titik nol IKN Nusantara sekaligus mengadakan prosesi ritual kendi Nusantara yang menyatukan tanah dan air se Indonesia. Tema kedua terkait lima polemik IKN: 1.Mematok tanah warga Kalimantan 2.Pembangunan IKN berpotensi menggusur 20 ribu masyarakat adat Kalimantan. 3.Undang-undang IKN cacat publik	Pemberitaan ini mengadung dua tema yang paling ditonjolkan, (1) tema Presiden Jokowi meminta izin ke parlemen pindahkan ibu kota negara kepulauan Kalimantan. (2) beberapa instansi tidak mendukung rencana pemindahan IKN, dipertegas dari kutipan langsung narasumber Fahri Hamzah	Terkait pemberitaan peresmian titik nol IKN Nusantara dan prosesi ritual kendi penyatuan tanah dan air seluruh Indonesia. Untuk menguatkan tema tersebut wartawan mencatumkan kutipan, pernyataan dan data dari narasumber menjadi tema utama dalam berita. Tema kedua pemindahan IKN menuai polemik dan kontra dari berbagai kalangan.

		4.Potensi pelanggaran ham 5.Pemindahan IKN menyisahkan permasalahan yang ada di ibu kota Jakarta	menyatakan “Riset Bappenas dangkal betul” saat diwawancarai pada jumat 16 Agustus 2019	
Retoris	Terdapat ungkapan yang digunakan Tempo.co yang mengandung unsur leksikon yaitu “Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya” yang mendukung usur sintaksis dalam berita.	Tempo.co secara general atau keseluruhan menggunakan unsur leksikon yang tedapat pada kata “beresiko”, “bukti sejarah”, “beresiko” dan “benda asing”. Sementara unsur metafora “ <i>smart green zero carbon</i> ”, “Insyah Allah”, “hidayah dan barakoh” “Allah subhanahu wa ta’ala”.	Berita yang dimuat oleh Tempo.co disajikan dalam bahasa Umum dan mudah dimengerti oleh pembaca. Tidak mengandung usur metafora dalam pemberitaan tersebut. Unsur grafis atau foto yang lebih menonjol.	Pada artikel berita ini Tempo.co menonjolkan unsur foto sebagai penguat informasi yang ingin dijelaskan atau dipaparkan. Ungkapan yang ditulis “mengada-ada”, “catatan kritis” dan “menyayangkan” sebagai koheren atas unsur sintaksis dan tematik.
Frame	Kebijakan pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota negara	Peresmian titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara dan mengadakan prosesi ritual kendi	Tempo.co memframe kebijakan pemerintah terkait rencana	Pemerintah meresmikan titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara

	(IKN) ke pulau Kalimantan, merupakan langkah pembangunan pemerataan ekonomi dan demi Indonesia maju.	Nusantara yang menggabungkan tanah dan air dari seluh provinsi Indonesia merupakan langkah dari kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara.	pemindahan ibu kota negara (IKN) ke pulau Kalimantan menuai pro dan kontra. Hal ini diperkuat dari narasumber yang dipilih oleh tempo.co yaitu Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR dan sigit Sosiantomo sebagai wakil ketua komisi V DPR. Menolak pemindahan IKN.	sekaligus mengadakan prosesi ritual kendi Nusantara dimana seluruh gubernur se Indonesia membawa tanah dan air untuk digabungkan di titik nol IKN. Hal ini tentunya menuai pro dan kontra.
--	--	---	--	--

Kesimpulan

Di media massa, framing menjadi aspek atau alat kognitif yang digunakan untuk menyajikan fakta-fakta atau informasi kepada masyarakat luas, mulai dari mengidentifikasi kode, menjelaskan, hingga cara menyajikannya. Setiap media memiliki konsep dalam membingkai berita untuk menentukan berita yang mana yang akan ditonjolkan untuk disampaikan kepada pembaca.

Republika.co.id memiliki *framing* kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara ke daerah Kalimantan, dan peresmian titik nol IKN Nusantara. Melalui unsur sintaksis,

Republika.co.id menonjolkan bahwa Presiden Jokowi meminta ijin ke parlemen untuk pindahkan ibu kota negara dan peresmian titik nol sekaligus mengadakan prosesi ritual kendi untuk menyatukan tanah dan air se-Indonesia yang ditanam di titik nol sebagai simbol kebhinekaan.

Tempo.co memiliki *framing* kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dan peresmian titik nol IKN Nusantara. Melalui unsur sintaksis, Tempo.co menonjolkan kritik terhadap kebijakan Presiden Jokowi pindahkan ibu kota negara dan peresmian titik nol serta pelaksanaan prosesi ritual kendi untuk menyatukan tanah dan air se-Indonesia simbol kebhinekaan.

Daftar Pustaka

- Alex, S. (2009). Analisis teks media. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Anwar, A., Mulyana, D., & Cangara, H. (2005). Ilmu komunikasi. *Jakarta: Kencana Pranada Group*.
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Bachtiar, A. Y., Perkasa, D. H., & Sadikun, M. R. (2016). Peran Media Dalam Propaganda. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 13(2)*.
- Ball-Rokeach, S. J., & DeFleur, M. L. (1976). A dependency model of mass-media effects. *Communication Research, 3(1)*, 3–21.
- Berger, P. L., & Luckman, T. (1966). *Social Construction of Reality: A treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Double Day & Company. Inc.
- Birkerts, S. (1994). The Gutenberg elegies: The fate of reading in an electronic. *Age, 129*.
- Bungin, B. H. M. (2006). Sosiologi komunikasi: teori, paradigma, dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat. *Language, 19(395p)*, 24cm.
- Damayanti, S., Putra, D. K. S., & Mayangsari, I. D. (2016). Framing Analysis of News About Jakarta ' S Northern Coast Reclamation on. *E-Proceeding of Management, 3(3)*, 3928–3936.
- <https://libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/3785>
- Danial, E. (n.d.). Nanang.(2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pkn UPI.
- De Vreese, C. H. (2005). News framing: Theory and typology. *Information Design Journal+*

- Document Design*, 13(1), 51–62.
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. LKiS.
- Gerbner, G. (1967). Newsmen and schoolmen: The state and problems of education reporting. *Journalism Quarterly*, 44(2), 211–224.
- Hadi, I. P. (n.d.). dkk.(2021). *Komunikasi Massa. Pasuruan: Qiara Media*.
- Halik, A. (2013). *Komunikasi massa*.
- Hariyanti, P. (2006). New Propaganda Model: Pertarungan Wacana Politik dalam Bisnis Media. *Jurnal Komunikasi*, 1(1), 31–40.
- Heychael, M., & Sarwono, B. K. (2015). Hakikat Komunikasi Massa Dan Era Informasi. *Modul Komunikasi Massa. Jakarta*.
- HM, Z. (2011). *The Journalist. Bandung: Simbiosis Rekatama Media*.
- Junita, F., & Syas, M. (2017). Perbandingan Frame Berita tentang Kasus Korupsi Proyek Pengadaan KTP Elektronik Antara Surat kabar Kompas dan Koran Tempo. *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, 1(01).
- Kriyantono, R., & Rakhmat, S. J. (2006). Metode penelitian komunikasi. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- McQuail, D. (1985). Sociology of mass communication. *Annual Review of Sociology*, 93–111.
- Moleong, Lexi J., & Edisi, P. (2004). Metodologi penelitian. *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Mutua, S. N., & Oloo Ong'ong'a, D. (2020). Online news media framing of COVID-19 pandemic: Probing the initial phases of the disease outbreak in international media. *European Journal of Interactive Multimedia and Education*, 1(2), e02006.
- Nazir, M. (2005). Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1), 55–75.
- Rakhmat, J. (2000). *Retorika modern: pendekatan praktis*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Reese, S. D. (1991). Setting the media's agenda: A power balance perspective. *Annals of the International Communication Association*, 14(1), 309–340.
- Romli, A. S. M. (2018). *Jurnalistik online: Panduan mengelola media online*. Nuansa Cendekia.
- Shoemaker, P. J. (1996). *Reese Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media*

Content. USA, Longman Publ.

- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (1996). *Mediating the message*. White Plains, NY: Longman.
- Sobur, A. (2012). Analisis Teks Media, Cet 6. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sofian, A., & Niken, D. (2021). Analisis framing pemberitaan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 (Analisis framing model Robert N. Entman pada media online Koran. tempo. co Edisi Maret 2020). 19 (2), 58–70. *Commicast*, 2(1), 58–70.
- Stamm, K. R., & Bowes, J. E. (1990). *The mass communication process: A behavioral and social perspective*. Kendall Hunt Publishing Company.
- Straubhaar, J., La Rose, R., & Davenport, L. (2009). *Media Now: Understanding Media, Culture and Technology 6th edition*. USA: Wadsworth Cengage Learning University of Twente.
- Subarsono, A. G. (2005). Pelayanan Publik yang Efisien, Responsif, dan Non-Partisan. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wibhisono, I. (2020). Analisis Framing Pemberitaan COVID-19 pada Koran Kompas: Edisi Januari 2020. *Jurnal Aspikom*, 5(2), 219–231.

